

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

PEGGY SANDE

00378 / 2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)

Nama : Peggy Sande

BP/NIM : 2008/00378

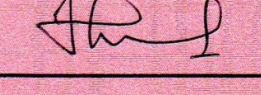
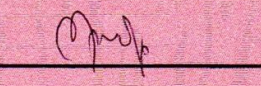
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 2 Januari 2013

Tim Penguji

<u>No. Jabatan</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Ketua	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Deviani, SE, M.Si, Ak	2. 
3. Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	3. 
4. Anggota	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	4. 

ABSTRAK

Peggy Sande (00378) : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2013.

**Pembimbing : 1. Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak.
2. Deviani, SE, M.Si, Ak.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 2) Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan responden Kepala SKPD dan Kepala Bagian Keuangan SKPD. Pemilihan sampel dengan metode *total sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada Kepala SKPD dan Kepala Bagian Keuangan SKPD. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji f untuk menguji apakah model yang digunakan sudah *fix* atau belum dan uji t untuk melihat pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,975 > 1,6649$ serta koefisien β bernilai positif (H_1 diterima). 2) Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana nilai signifikansi $0,028 < 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,234 > 1,6649$ serta koefisien β bernilai positif (H_2 diterima).

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi seluruh instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar dapat meningkatkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan. 2) Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, juga dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan penggantian teknik pengambilan sampel, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.

5. Teristimewa untuk Ayahanda Nabris dan Ibunda Afrilinda yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan moril dan materil untuk keberhasilan penulis.
6. Untuk kakak penulis, Bima Eka Putra, SS, M.Pd yang selalu memberikan dukungan dan arahan untuk keberhasilan penulis.
7. Teman-teman penulis yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2008.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL	
DAN HIPOTESIS	10
A. Kajian Teori	10
1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	10
2. Penyajian laporan Keuangan	22
3. Aksesibilitas Laporan Keuangan	34
4. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap	
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	39

5. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	40
B. Kerangka Konseptual.....	42
C. Hipotesis.....	44
BAB III. METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Populasi dan Sampel	45
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Variabel Penelitian	48
F. Pengukuran Penelitian	49
G. Instrumen Penelitian	50
H. Uji Validitas dan Reliabilitas	51
I. Hasil Uji Coba Instrumen.....	53
J. Uji Asumsi Klasik	54
K. Teknik Analisis Data	55
L. Definisi Operasional	59
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	61
B. Demografi Responden	62
C. Deskripsi Variabel Penelitian	66
D. Statistik Deskriptif	71
E. Uji Validitas Dan Reabilitas	72

F. Uji Asumsi Klasik	73
G. Hasil Penelitian	77
H. Pembahasan.....	81
BAB V. PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Keterbatasan	86
C. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar SKPD.....	46
2. Skala Pengukuran.....	49
3. Instrumen Penelitian	50
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha & Corrected Item Total Correlation</i>	54
5. Tingkat Pengembalian Kuesioner	61
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	63
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	64
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	65
10. Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	66
11. Distribusi Frekuensi Variabel Penyajian laporan Keuangan.....	68
12. Distribusi Frekuensi Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	70
13. Statistik Deskriptif	71
14. Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> Terkecil.....	72
15. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Penelitian	73
16. Uji Normalitas	74
17. Uji Multikolinearitas	75
18. Uji Heterokedastisitas	76
19. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	77

20. Koefisien Regresi.....	78
21. Uji F Hitung.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	90
2. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Pilot Test.....	95
3. Tabel Distribusi Frekuensi Skor Variabel	98
4. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Data Penelitian	105
5. Statistik Deskriptif	108
6. Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas	109
7. Uji Hipotesis	110

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang di dalamnya menjelaskan konsep otonomi daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007). Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak saja harus mengalokasikan dana publik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga harus mengelola dana publik tersebut sesuai dengan UU dan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kepatuhan terhadap UU dan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah diperiksa institusi pemeriksa internal daerah (Bawasda) maupun pemeriksa eksternal (BPK).

Sejak diberlakukannya PP No. 58/2005 Pasal 4 terdapat paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Paradigma tersebut adalah menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatuhan serta manfaat bagi masyarakat. Pada kondisi ini, masyarakat dipandang tidak lagi sekedar obyek pembangunan tetapi berperan sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan (Halim, 2007).

Akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedangkan pengertian akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk

mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007)

Menurut LAN dalam Akuntabilitas dan *Good Governance* (2000), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah harus mampu menyusun laporan keuangan yang komperhensif. Implikasi dari penyusunan laporan keuangan pemerintah yang komprehensif adalah laporan keuangan yang disusun bersifat akuntabel.

Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Bastian, 2006). Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan

keuangannya. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersial, informasi berupa laporan keuangan seharusnya merupakan hasil dari sebuah proses akuntansi. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban itu tidak hanya wajib disampaikan kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemberi mandat atau kekuasaan kepada pemerintah.

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No. 33 Tahun 2004). Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Namun dalam kenyataannya, pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih mengecewakan. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat wajar dengan pengecualian karena pembatasan ruang lingkup dan penyimpangan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK menemukan adanya pengeluaran belanja barang dan jasa pada beberapa SKPD sebesar Rp. 404,65 juta tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan tidak sesuai ketentuan. Fenomena ini menunjukkan lemahnya penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan tidak adanya bukti pendukung terhadap pengeluaran yang telah terjadi. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus memperbaiki dan membenahi berbagai kelemahannya untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

BPK menemukan masih banyak permasalahan pada penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Barat. Salah satunya pada neraca daerah, yaitu masalah dalam penyajian nilai aktiva. BPK menemukan adanya penyajian aset tanah sebesar Rp.27,81 miliar tidak wajar dan tidak konsisten dengan SAP periode 31 Desember 2010.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga belum mampu menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada publik. Publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum mempublikasikan laporan keuangannya secara luas melalui media massa. Sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui atau mengakses dengan mudah mengenai informasi kinerja keuangannya.

Adapun penelitian mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kebanyakan penelitian dilakukan mengenai pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Mulyana (2006) yang meneliti mengenai pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang menyatakan bahwa penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan

keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ada juga penelitian Nasution (2009) yang meneliti mengenai pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD, yang menyatakan penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Selanjutnya penelitian Bandariy (2011) yang meneliti tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Pada penelitian ini peneliti tidak hanya meneliti pengaruh penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tapi meneliti pengaruh penyajian laporan keuangan (laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian sebelumnya dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Provinsi Sumatera Utara, namun pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena masih banyak permasalahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**. Penelitian ini akan dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka perumusan masalah penelitian adalah :

1. Sejauhmana pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Sejauhmana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Bagi penulis

Menambah wawasan dan memperkaya literatur mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi akademis

Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Negeri Padang.

3. Bagi pemerintah

Sebagai masukan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedangkan pengertian akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006). Sedangkan Serdamayanti (2004) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan,

penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran, pembukuan dan pemeriksaan secara operasional. Apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah pelaksanaan yang meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Domai, 2002).

c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim : 2006).

Menurut LAN dalam Akuntabilitas dan *Good Governance* (2000), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya

adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah.

Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh *agent* yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, 2004).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan

daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah (Halim, 2007).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur. Menurut Halim (2007), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

1) Perencanaan Keuangan Daerah

Proses perencanaan keuangan daerah terdiri atas:

a) Proses Penyusunan APBD

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang merupakan indikator dan atau sasaran kinerja pemerintah daerah yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja pemerintah daerah. Proses penyusunan APBD dimulai dengan menyiapkan rancangan APBD. Untuk itu pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Selanjutnya berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. Jika strategi dan prioritas APBD telah disusun dengan

mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, pemerintah daerah menyiapkan rancangan APBD.

b) Proses Penetapan APBD

Proses selanjutnya setelah penyusunan APBD adalah penetapan APBD. Untuk penetapan ini kepala daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan APBD yang disampaikan kepala daerah tersebut dapat disetujui atau tidak disetujui DPRD. Jika rancangan APBD tidak disetujui DPRD, maka pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Selanjutnya penyempurnaan rancangan APBD tersebut harus disampaikan kembali ke DPRD. Jika rancangan APBD sudah disempurnakan tersebut tidak disetujui lagi, maka pemerintah daerah dapat menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai pengurusan keuangan daerah.

c) Perubahan APBD

Dalam perjalanannya, APBD yang telah disetujui DPRD dapat mengalami perubahan. Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir. Jangka waktu 3 bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

2) Pelaksanaan Keuangan Daerah

Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut. Perangkat daerah tersebut adalah orang/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dalam pelaksanaan keuangan daerah, semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga, dan jasa dari penjualan, pengadaan barang atau jasa, penyimpanan uang daerah, dan penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD. Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Tindakan yang dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan

anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD.

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang. Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Pembebanan APBD tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Bukti yang dimaksud adalah kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, serta perjanjian pengadaan barang dan jasa. Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, serta bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pengguna keuangan daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran. Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat perintah membayar. Surat perintah membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat perintah membayar ditetapkan oleh bendahara umum daerah. Bendahara umum daerah membayar berdasarkan surat perintah membayar. Bendahara umum daerah

dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar surat perintah membayar.

3) Pelaporan Keuangan Daerah

Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut setidaknya tidaknya terdiri dari:

- a) Laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode.
- b) Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada satu tanggal tertentu.
- c) Laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
- d) Catatan atas laporan keuangan, yaitu bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Menurut Yani (2004), untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai:

- a) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pokok-pokok pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi.
- b) Kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi.

Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dinyatakan dalam satu bentuk laporan. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah terdiri atas:

- a) Laporan Perhitungan APBD
- b) Nota Perhitungan APBD

Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembayaran serta kinerja keuangan daerah

- c) Laporan aliran kas
- d) Neraca daerah

Setiap pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah DPRD dalam sidang pleno terbuka menerima atau menolak dengan meminta untuk menyempurnakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Penolakan laporan oleh DPRD harus disertai dengan alasannya. Proses lebih

lanjut dari penolakan pertanggungjawaban Kepala Daerah tersebut mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Audit atas laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan unsur dalam bidang pengendalian dan pelaksanaan tanggungjawab pemerintah di bidang keuangan. Audit dapat memberikan keandalan laporan keuangan yang disampaikan melalui bukti yang telah dievaluasi secara objektif.

Untuk menciptakan lembaga audit yang efisien dan efektif, maka diperlukan reposisi terhadap lembaga audit yang ada. Reposisi yang dimaksud berupa pemisahan tugas dan fungsi yang jelas dari lembaga-lembaga pemeriksa pemerintah tersebut, apakah sebagai auditor internal atau auditor eksternal.

Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Yang termasuk audit internal adalah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprov),

Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilo), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sedangkan audit eksternal adalah audit yang dilakukan unit pemeriksa yang berada di luar organisasi yang diperiksa. Lembaga pemeriksa eksternal tersebut merupakan lembaga pemeriksa yang independen. Dalam hal ini yang bertindak sebagai auditor eksternal pemerintah adalah BPK. Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

5) Pengawasan Keuangan Daerah

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan yang menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan-pengumpulan pendapatan, pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan (Halim, 2006). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata ditujukan untuk mencari kesalahan. Tujuan utama

pengawasan adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian tujuan.

Menurut Halim (2007), tujuan pengawasan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah.
- b) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- c) Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Bastian (2001), pengawasan keuangan daerah dilakukan melalui audit keuangan (*Financial Audit*). Audit keuangan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan dioperasikan secara tepat dan efisien, dan bahwa transaksi keuangan telah diotorisasi dan dihitung secara benar.

Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar, tentang posisi keuangan, hasil

operasi/usaha, dan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Dalam pemeriksaan keuangan, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan.

SKPD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

a. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Nordiawan (2010), tujuan penyajian laporan keuangan organisasi pemerintahan adalah:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai laporan keuangan. Menurut Bastian (2006), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan yang relevan:

a) Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan selengkap mungkin yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

b) Laporan keuangan disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna bagi pengambilan keputusan.

2) Andal

Laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Laporan keuangan disajikan dengan jujur, transaksi dalam laporan keuangan disajikan secara wajar.

b) Dapat Diverifikasi (*Veriability*)

Laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan

periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) neraca dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan harus dilakukan secara konsisten.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta

peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas dari satu periode ke periode dalam entitas yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan pemerintah, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas, membantu pencapaian daya banding.

Kebutuhan terhadap daya banding jangan dipengaruhi dengan keseragaman semata-mata dan tidak menjadi hambatan dalam memperkenalkan standar akuntansi pemerintah yang lebih baik. Entitas tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Entitas juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mengetahui isi yang dimaksud dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

c. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah dalam satu periode, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005) tujuan dari laporan realisasi anggaran terdiri atas dua bagian, yaitu:

- a) Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan

realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaranya dalam satu periode.

Dalam menyusun laporan realisasi anggaran minimal pos yang dilaporkan adalah: pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA).

Informasi-informasi yang disediakan oleh laporan realisasi anggaran adalah mengenai informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaranya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan:

- a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.

- b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD).
- c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Neraca

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 dinyatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Penyajian laporan keuangan berupa neraca adalah penting, sebab pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi dan akuntabilitas (Diamond, 2002 dalam Mulyana, 2006).

Manfaat informasi keuangan yang terkandung di dalam neraca menurut Diamond (2002) dalam Mulyana (2006) yaitu:

- a) Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya ada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola.
- b) Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini

merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.

- c) Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
- d) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Sebaliknya, dengan tidak adanya informasi seperti yang dilaporkan dalam neraca akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengaruh dari transaksi keuangan pada pemerintah daerah dalam suatu periode tidak tercermin secara penuh, misalnya tidak ada pelaporan mengenai piutang pajak, saldo aktiva persediaan, aktiva dalam konstruksi, kewajiban saat ini untuk menyerahkan (membayar) sejumlah uang atau barang di masa yang akan datang.
- b) Akuntabilitas terbatas pada penerimaan dan penggunaan kas dan mengabaikan transparansi dan akuntabilitas untuk pengelolaan aset dan utang.
- c) Tidak memfasilitasi penilaian posisi keuangan karena tidak menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
- d) Informasi yang dibutuhkan tidak memadai untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menggambarkan arus masuk kas dan keluar yang terjadi selama periode anggaran, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti :

- a) Bagaimana pemerintah daerah memperoleh sumber dana kas dan bagaimana menggunakan sumber dana tersebut.
- b) Darimana pemerintah daerah mendapatkan pinjaman dan bagaimana kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
- c) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi likuiditas pemerintah daerah, yaitu kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo atau yang harus segera dilunasi.

Manfaat informasi Laporan Arus Kas menurut PP No 24 Tahun 2005 adalah:

- a) Sebagai indikator terhadap jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- b) Alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
- c) Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, Laporan Arus Kas memberikan informasi yang bermanfaat

bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Pembuatan catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Laporan keuangan yang telah disusun dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pembaca laporan keuangan tersebut. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan (PP No. 24 Tahun 2005).

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya (PP No. 24 Tahun 2005).

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain :

- a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

3. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau

kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koester, 2002 dalam Rohman, 2009). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henly *et al*, 1992, dalam Rohman, 2009).

Menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan sstewardship*).

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004, dalam Mulyana, 2006).

Menurut Yani (2009), pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komperhensif kepada masyarakat luas termasuk informasi keuangan daerah. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan memberdayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No.

33 Tahun 2004). Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi:

a. Keterbukaan

Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media masa.

b. Kemudahan

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada *stakeholder* dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.

c. *Accesible*

Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

Serikat dagang sektor publik GASB (1999) dalam Mardiasmo (2002) mengidentifikasi pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

- a. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggungjawab.
- b. Legislatif dan Badan Pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat.
- c. Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan/atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman.

Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah menurut Mardiasmo (2002):

- a. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
- b. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran yang dilakukan.
- c. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.
- d. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.
- e. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dengan organisasi lain yang sejenis.
- f. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

4. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Mulyana (2006), menyatakan bahwa penyajian neraca daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ada juga Nasution (2009), yang menyatakan bahwa penyajian neraca SKPD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apalah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses

bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006). Untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Berarti dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Mulyana (2006), menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ada juga Nasution (2009), yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan SKPD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Kedua penelitian ini menunjukkan

bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna akan mewujudkan terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk dapat menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti oleh penulis yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen, serta penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan sebagai variabel independen.

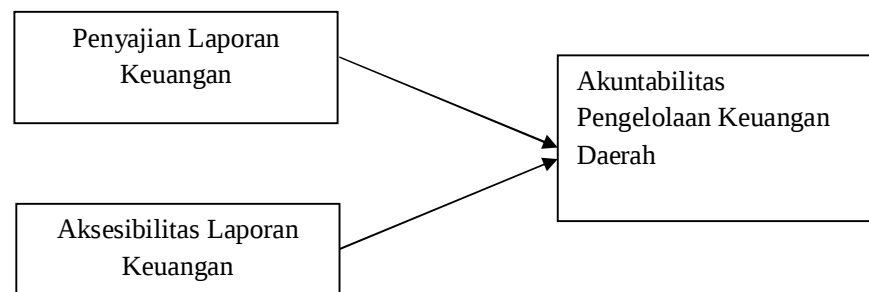
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum. Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah adalah laporan

realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan atas laporan keuangan merupakan elemen penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan yang dibuat bagi pengguna laporan keuangan. Alasannya adalah apalah artinya menyajikan laporan keuangan tapi tidak memberikan kemudahan akses terhadap para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan bisa berjalan maksimal. Berarti dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Untuk lebih jelasnya kaitan antara variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

C. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, kajian teori dan kerangka konseptual di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

HI : Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H2 : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

B. Keterbatasan

Meskipun penelitian ini telah dirancang dan direncanakan semaksimal mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi peneliti selanjutnya antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan.
2. Penelitian ini masih terbatas pada pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Penelitian ini hanya terbatas pada SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah baik, namun masih harus dilakukan peningkatan agar lebih baik lagi untuk kedepannya.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperluas sampel dan lokasi penelitiannya, agar hasil penelitian nantinya dapat digeneralisasi.
4. Untuk penelitian selanjutnya dalam mengumpulkan data dapat dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis, penggantian teknik pengambilan sampel penelitian serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.